

BAB I

PENDAHULUAN

Pada BAB ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Posisi geografis Turki yang berbatasan dengan Benua Asia dan Eropa memudahkan mobilisasi dan interaksi ke negara-negara di Eropa dan Asia. Selain berdekatan dengan kedua benua tersebut, Turki juga terhubung secara geografis dengan Benua Afrika melalui cekungan Mediterania Timur. Sejak jatuhnya Kekaisaran Ottoman, Turki mempertahankan hubungan erat dengan wilayah Sub Sahara. Wilayah Afrika Utara pun selalu menjadi kepentingan khusus atas relasi hubungan sejarah budaya dan wilayah geografis yang begitu dekat.

Kekaisaran Ottoman memegang peran signifikan dalam hubungan Turki-Afrika. Lantaran negara-negara Afrika menjadi bagian dari kekaisaran, seperti wilayah Afrika Utara yaitu Aljazair, Libya, Tunisia dan Mesir. Setelah runtuhnya kerajaan Turki Usmani, negara-negara di kawasan Afrika yang dahulu menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya telah menjadi negara-negara merdeka. Berakhirnya sistem kekhilafahan Turki menandai perubahan bentuk negara menjadi republik yang mengadopsi sistem demokratis-sekuler seperti di Barat pada masa Kemal Ataturk.

Sekulerisme Turki model Kemal mulai berubah ketika partai AKP berkuasa pada tahun 2002. Pada masa AKP, kebijakan luar negeri Turki juga berbeda dengan periode kepemimpinan Kemal. Hal ini ditunjukkan Turki yang semakin terbuka terhadap Islam dan sejarah masa lalu dalam membuat

kebijakan luar negerinya. Di bawah “Doktrin Kedalaman Strategis” sebagai kombinasi dari politik nyata dan ideologi yang dikembangkan Mantan PM Ahmet Davutoglu mengantarkan Turki sebagai aktor yang berpengaruh di kawasan dengan memanfaatkan pengembangan aspek geokultural dan geopolitik. Saat ini, Turki dibawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan yang membentuk kebijakan luar negeri dengan menarik sejarah dibawah Kekaisaran Ottoman. Seiring dengan kerusuhan politik di dunia Arab pasca Arab Spring, kebijakan Turki mulai konfrontatif dalam menghadapi isu-isu di negara tetangga yaitu Timur Tengah dan Afrika Utara yang tak lepas dari konflik (Caassin, 2019).

Turki sangat memperhatikan peristiwa *Arab Spring* yang terjadi di kawasan Afrika Utara. Bermula dari Tunisia, *Arab Spring* menyebar ke negara-negara tetangganya seperti Mesir dan Libya. Meskipun dinamika politik dalam negeri, peristiwa *Arab Spring* telah menarik keterlibatan negara-negara lain. Ketidakstabilan ekonomi dan politik di negara-negara *Arab Spring* menjadi gerbang terbukanya intervensi asing ataupun menjatuhkan rezim yang berkuasa di negara-negara itu.

Arab Saudi merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam peristiwa ini. Pada saat Mesir tengah mengalami transisi politik pasca lengsernya Husni Mubarak dalam peristiwa *Arab Spring* dan digantikan oleh Mursi, Arab Saudi dengan terang-terangan mendukung kudeta militer yang dilakukan Fattah al Sisi dengan dalih bahwa pemerintahan Presiden Mursi yang didominasi Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok teroris yang harus diperangi. Presiden Mursi pun berhasil di gulingkan dari kekuasaannya (Bayat, 2017).

Pasca tewasnya mantan pemimpin Libya, Muammar Khadafi, dalam peristiwa *Arab Spring* tidak secara otomatis lebih baik. Dahulu, Libya dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia yang berada di kawasan Afrika. Sejak terjadinya revolusi tahun 1969 yang

menggulingkan Raja Idris, Libya dipimpin oleh sosok pemimpin muda yang bernama Muammar Khadafi sebagai *Brother Leader* dan mengganti sistem pemerintahan. Muammar Khadafi membangun Libya dengan caranya sendiri dengan menerbitkan Kitab *Al-Akhdar* 'Buku Hijau' yang berisikan tentang buku suci politik Libya. Inti dalam buku tersebut ialah menempatkan dunia pada revolusi politik, ekonomi dan sosial agar mampu membebaskan masyarakat dunia dari penindasan. Beliau pun menjabat lebih dari 40 tahun (Southgate, 2019).

Libya sebagai negara penghasil minyak memiliki pendapatan sejumlah 52,8% hanya dari sektor minyak saja. Namun, karena keserakahan dan korupsi yang dilakukan pemimpinnya, pembangunan yang semula dicanangkan tidak dapat terwujud. Terlebih lagi, pada masa kepemimpinannya, Muammar Khadafi dikenal sebagai sosok yang otoriter sehingga memunculkan krisis kepercayaan rakyat. Puncaknya pada 15 Februari 2011, ratusan orang di sejumlah kota di Libya seperti di Benghazi, Bayda dan Zintan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut turunnya Khadafi (Brewster, 2020). Pemerintah Libya menjawab tuntutan tersebut dengan tindakan represif sehingga menimbulkan gesekan antara para demonstran dengan pemerintah Libya.

Demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Libya diwarnai dengan aksi penyerangan dan pembakaran gedung-gedung milik pemerintah sehingga para polisi dan tentara dikerahkan ke jalan guna membubarkan aksi secara paksa. Pada awalnya hanya aksi pembubaran demonstrasi secara paksa, lambat laun berubah menggunakan senjata peluru. Konflik yang tak terhindarkan antara aparat dengan rakyat berimbas pada digantungnya sejumlah anggota kepolisian yang tertangkap massa. Menanggapi situasi yang semakin rumit, pemerintah Libya memutuskan mengerahkan pesawat tempur dimulai sejak 21 Februari guna membombardir massa di ibu kota.

Pemimpin Libya, Muammar Khadafi berhasil digulingkan pada 2011. Semenjak saat itu situasi domestik Libya mulai

kacau dan terfragmentasi akibat pertempuran antar faksi, diantaranya suku Cyrenaice, Islamis dan nasionalis. Ditengah-tengah transisi politik Libya 2012-2013, terselip kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Kongres Nasional Umum atau *General National Congres* (GNC) yang memimpin Libya berdasarkan pemilu 2012 diserang Tentara Nasional Libya atau *Libyan National Army* (LNA) yang dikomandoi Khalifa Haftar pada 2014.

Khalifa Haftar merupakan seorang jenderal yang sebelumnya bekerja dibawah Khadafi dan telah tinggal di Amerika Serikat selama 20 tahun sebelum kembali ke Libya saat *Arab Spring*. Setelah di Libya, Haftar membentuk Tentara Nasional Libya (LNA) dan menyatakan keberpihakan pada Dewan Perwakilan Rakyat atau *House of Representative* (HoR). Situasi ini membuat kekacauan politik domestik Libya.

Menanggapi iklim politik Libya yang tidak stabil, PBB menginisiasi pembentukan Pemerintah Kesepakatan Nasional atau *Government of National Accord* (GNA) pada 17 Desember 2015. GNA dinyatakan sebagai pemerintah sementara dan diakui secara internasional. Keputusan ini adalah hasil konferensi internasional tentang Libya di Skhirat, Maroko. Pada kesempatan tersebut Fayeze Al Sarraj ditunjuk sebagai pemimpin GNA dan berbasis di Tripoli. Aksi yang dilakukan oleh PBB merupakan upaya mengakhiri perang saudara pasca empat tahun Khadafi digulingkan dalam revolusi *Arab Spring* (TEKİR , 2020).

GNA PM Fayeze al Sarraj mengambil alih Tripoli sejak 30 Maret 2016. Namun kekuatan sebenarnya masih berada ditangan milisi sehingga setelah pengambilalihan tersebut pihak Dewan Perwakilan Rakyat (HoR) yang berada di Tobruk menarik pengakuannya terhadap GNA dimusim panas 2016. Bahkan menyatakan menjadi pesaing politiknya. Peristiwa ini semakin memperkeruh suasana domestik Libya. Meski begitu, baik PBB maupun AS tetap mengakui GNA sebagai representasi pemerintah Libya yang sah secara internasional.

Selain itu, konflik ini menarik keterlibatan aktor lain seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Rusia dan Prancis yang memiliki kepentingan di Libya (Brewster, 2020).

Pada 4 April 2019, pasukan Khalifa Haftar (LNA) melakukan penyerangan dari darat maupun udara guna merebut pemerintahan Tripoli (Aljazeera, 2020). Aksi serangan ini didukung oleh Arab Saudi dan Mesir yang sedang berusaha membantu sekutunya untuk menyingkirkan Ikhwanul Muslimin dari Afrika Utara sekaligus mengalahkan sekutu Qatar disegala penjuru. GNA yang selama ini mendapat dukungan dari Qatar, Inggris, Amerika Serikat, Aljazair dan Italia sejak awal pembentukannya tidak mendapatkan bantuan militer atas peristiwa penyerangan ini (Studies, 2020).

Korban jiwa berjatuhan dalam peperangan pasukan al Sarraj yang berusaha mempertahankan Tripoli melawan pasukan Khalifa Haftar. Tercatat 264 orang tewas, termasuk 21 warga sipil, 1.266 orang luka-luka dan 32.000 penduduk mengungsi sejak 4 April hingga 25 April 2019. Korban terus bertambah ketika babak pertempuran memasuki bulan ketiga, 1.000 tewas termasuk warga sipil dan 5000 lainnya luka-luka. Tidak hanya itu, pertempuran mengakibatkan 100.000 orang mengungsi sejak peristiwa bergulir dari April hingga Juni (Aljazeera, 2019).

Situasi ini membawa Libya diambang perang saudara lebih besar yang implikasinya tidak hanya ke kawasan sekitar tetapi lebih luas. Meskipun GNA meminta seluruh dunia untuk bekerjasama menghadapi serangan LNA, aktor internasional dan PBB tetap diam. Turki selama ini memilih netralitas atas konflik Libya bahkan saat anggota NATO mengintervensi Libya dalam *Arab Spring* akhirnya muncul dan terlibat sebagai salah satu aktor regional yang memainkan peran besar dengan memberi dukungan secara terbuka sejak Mei 2019 pada kubu GNA di Tripoli (Kekili & Öztürk, 2020).

Munculnya Ankara dalam pusaran konflik Libya menuai kritik dari Arab Saudi. Negara ini dengan tegas mengecam

keterlibatan Ankara sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan regional dan campur tangan urusan internal negara Arab. Kritik tajam dan ancaman pada Ankara juga dilontarkan Mesir. Mesir menyatakan Erdogan telah mengambil risiko yang besar untuk menghadapi perlawanan diplomatik dan militer. Selain itu, keterlibatan Ankara di Libya tidak mendapat sambutan baik dari publik Turki. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan firma *Istanbul Ekonomi Arastirma* menyimpulkan 58 persen warga Turki tidak menyetujui pengerahan pasukan Turki ke Libya. Dilain sisi, Erdogan juga mengutuk keras serangan Haftar di Tripoli sebagai bentuk ancaman terhadap stabilitas kawasan. Ditengah situasi tersebut, Erdogan tegas menyatakan komitmennya dalam konflik Libya (Zontur , 2020).

Turki secara bertahap mengerahkan dukungannya militernya sejak bulan Januari 2020 yang didasarkan pada perjanjian koordinasi militer dan keamanan dengan pemerintah GNA. Peristiwa ini mengikuti PM al Sarraj yang meminta Turki membantu negaranya melawan serangan Khalifa Haftar. Bantuan Turki berkontribusi dalam mengubah jalannya pertempuran dan keberhasilan pasukan GNA dalam mengusir pasukan LNA dari kota-kota di Pantai Barat, Tripoli, pangkalan udara Al Watiya, dan Kota Tarhuna. Peristiwa inilah yang menjadi titik balik keterlibatan Turki dalam perang saudara Libya (Edelman & Wald, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis buat di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan rumusan masalah “*Mengapa Turki terlibat dalam konflik internal Libya tahun 2019-2020?*”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui keterlibatan Pemerintah Turki dalam konflik internal di Libya;

2. Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai faktor-faktor Pemerintah Turki terlibat dalam konflik internal Libya pada tahun 2019-2020;
3. Untuk memperkaya kajian Hubungan Internasional terutama dalam mata kuliah Hubungan Internasional di Timur Tengah dan Afrika Utara.

D. Kerangka Teori

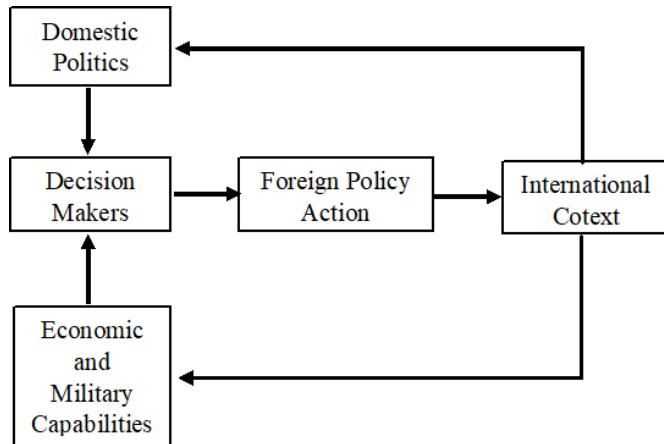
Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut,

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri (William D. Coplin)

Hakikatnya, kebijakan luar negeri dari suatu negara merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berhubungan dengan fenomena antar bangsa. Berkaitan dengan hal ini, pada umumnya, kebijakan tersebut dikeluarkan oleh suatu negara untuk mengambil sikap atas isu-isu atau fenomena yang terjadi di negara lainnya. Untuk dapat menjelaskan kebijakan yang diambil pemerintah Turki dalam konflik Libya, dalam tulisan ini penulis menggunakan kerangka teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri milik William D. Coplin, sebagaimana teori ini tertuang dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to International Politics*". Dalam teori tersebut memuat penjelasan tentang bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri tersebut dirumuskan dan hal-hal yang memberikan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan luar negeri dari suatu negara.

William D. Coplin menggambarkan teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dalam sebuah model sederhana yang mampu memberikan pemahaman serta penjelasan proses pengambilan kebijakan negara, dalam hal ini kebijakan tersebut dibentuk atas tiga konsederasi penting yaitu: pertama berkaitan dengan kondisi politik domestik, kedua kapabilitas ekonomi dan militer dan yang ketiga ialah konteks internasional. Berikut adalah gambaran model teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri:

Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D. Coplin



a. Situasi Politik Domestik

Situasi politik domestik suatu negara dapat memberikan pengaruh dalam penyusunan politik dalam negeri. Perbedaan sistem yang diadopsi seperti halnya sistem politik otokrasi atau demokratis dan terbuka atau tertutup akan mempengaruhi penyusunan kebijakan luar negeri negara (Coplin, 1971). Meski begitu, hal ini juga didukung relasi antara pengambilan kebijakan luar negeri dan aktor dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negerinya. Aktor yang mempengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan disebut sebagai pemberi pengaruh kebijakan. Sementara itu, relasi yang terjalin antara aktor politik dalam negeri dengan pengambil keputusan luar negeri disebut dengan pengaruh kebijakan sistem.

Lebih lanjut, William D. Coplin menambahkan didalam sistem pengaruh kebijakan terdapat timbal balik antara

pengambil keputusan dan pemberi pengaruh kebijakan. Pemberi pengaruh kebijakan adalah sumber dukungan untuk memperkuat rezim tertentu disuatu negara. Hal ini berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokratis maupun otokratis. Para pemimpin negarapun sangat bergantung pada kemauan rakyat untuk memberikan dukungan. Dukungan dapat berupa dukungan dalam pemilu, loyalitas angkatan bersenjata, dukungan keuangan dari para pengusaha dan lain-lain. Dukungan seperti ini sangat diperlukan rezim agar posisinya lebih pasti dan mampu memperkuat legitimasinya dengan adopsi kebijakan yang tepat.

Faktor utama dalam menentukan politik luar negeri suatu negara ialah kondisi politik dalam negeri. Politik dalam negeri dapat merujuk pada kepentingan nasional negara atau perilaku suatu negara yang ingin diimplementasikan dalam politik luar negeri. William D Coplin membagi empat jenis *policy influencer* yang dapat mempengaruhi politik dalam negeri sebagai berikut:

1. *Bureaucratic influencer*: merupakan pihak yang berupa individu maupun organisasi yang berperan dalam lembaga eksekutif di pemerintahan yang membantu sang pengambil keputusan dalam merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan.

2. *Partisan influencer*: partai politik di suatu negara berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan karena politik dalam partai mampu menjembatani kepentingan antara rakyat dengan pemerintahnya. Dengan kata lain, parpol mampu menampung, menyampaikan tuntutan maupun argument serta saran dari rakyat kepada pemerintah.

3. *Interest influencer*: terdiri dari sekelompok orang yang memiliki minat yang sama, kepentingan nasional suatu negara dapat berupa motif politik maupun ekonomi. Guna membuktikan secara tepat bahwa *interest influencer* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan negara, harus memahami situasi dinamis dari berbagai aspek seperti latar

belakang, kepentingan dan minat yang dimiliki orang tertentu maupun kelompok.

4. *Mass influencer*: komunikasi massa mendorong banyak opini publik atau masyarakat dan mampu memobilisasi melalui media massa. Mereka berperan dalam memberikan perspektif lain kepada pemerintah dari kebanyakan orang. Dengan begitu, opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri melainkan untuk merasionalisasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, Turki merupakan negara yang menganut sistem sekuler pada pemerintahannya meskipun memiliki sejarah panjang tentang Kekaisaran Ottoman. Pada masa pemerintahan Kemal Ataturk, sistem pemerintahan Turki yang semula kekaisaran diubah menjadi sistem republik. Dengan begitu, sekuleritas sangat kontras dengan pemisahan antara urusan agama dengan politik. Karena inilah, pada masa Attaturk arah kebijakan luar negeri Turki cenderung berorientasi ke arah negara-negara barat (Gürcan, 2020).

Partai Islam Turki memenangkan pemilu 2001 dan mengantarkan Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri Turki. Namun kemenangan Partai Islam Turki tidak mampu mengubah arah kebijakan luar negeri. Hal ini ditunjukkan dengan tetap terjalinnya hubungan baik dengan Israel maupun AS dalam menyikapi isu konflik di Timur Tengah. Kondisi ini berangsur berubah ketika 9 warga Turki tewas diserang oleh tentara Israel dalam peristiwa operasi kapal Navi Marmara. Rakyat Turki yang geram atas peristiwa ini mampu menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada Israel. Akibatnya berujung pada konfrontasi sehingga hubungan diplomatik kedua negara menjadi tegang.

Saat ini pemerintahan Turki dibawah kekuasaan Recep Tayyip Erdogan, beliau merupakan pendiri dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang mengungsung ideologi Islam. Walaupun begitu, Erdogan tetap mendukung pendekatan moderat dalam partainya sehingga AKP mampu menarik para pemilih moderat, inilah yang membuat partai AKP mampu

memperoleh kemenangan pada pemilu pertama partainya ditahun 2002 silam. Semenjak saat itu, AKP telah mendulang kemenangan pemilu di tiga pemilihan umum lainnya. Berkaitan dengan konflik Libya, AKP yang menguasai parlemen memberikan dukungan atas keterlibatan Turki di Libya.

b. Faktor Ekonomi dan Militer

Dalam analisa yang dilakukan William D. Coplin, faktor ekonomi dan militer dapat mempengaruhi arah pengambilan keputusan, hal ini terilhami dari perilaku para raja Eropa di abad pertengahan. Baik ekonomi maupun militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja. Begitu sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas terhadap peningkatan kekuatan militer. Kedua variable ini, menurut Coplin menjadi modal utama dari negara-negara Eropa untuk menjajah Eropa dan Asia. Terkait hal ini, Coplin melihat kemampuan ekonomi dan militer sebagai faktor yang berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, terlepas dari perdebatan panjang terkait mana yang lebih penting antara kemampuan ekonomi dan militer. Pada kenyataannya, kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dapat membangun negara-negara tertentu untuk lebih aktif dalam panggung politik internasional. Khusus pada bidang kemiliteran, Coplin membagi tiga kriteria utama yaitu terkait dengan pasukan, tingkat pelatihan dan sifat peralatan militernya (Coplin, 1971).

Ketiga kriteria inilah yang menjadi faktor penentu kekuatan militer suatu negara. Dengan mengacu pada ketiga kriteria tersebut, pengambilan keputusan asing dapat melihat seberapa efektifnya. Karena itulah, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi posisi tawarnya di negara lain hingga berimbas pada penentuan sikap negara lain terhadap politik luar negeri suatu negara. Kemampuan militer dan ekonomi merupakan elemen yang mempengaruhi kemampuan

negara untuk memberikan tekanan kepada negara lain. Selain itu, ekonomi dan militer merupakan hal yang sangat dibutuhkan negara dalam menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara maka akan mudah dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kemampuannya.

Kebijakan Turki yang semakin gencar memperluas kekuatannya di Kawasan Mediterania Timur dan Afrika Utara termasuk terlibat dalam perang saudara Libya tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi Turki yang mengalami resesi sejak 2018 dan diperburuk oleh situasi pandemi Covid-19 yang semakin menurunkan nilai Lira. Turki berupaya mengembalikan kondisi perekonomian ke arah yang stabil melalui penandatanganan nota kesepahaman dibidang maritim dan keamanan dengan Pemerintah Tripoli sehingga Turki mendapat akses untuk mengeksplorasi gas di sepanjang batas laut kedua negara. Bahkan berdasarkan pernyataan Kepala Asosiasi Kontraktor Turki, M. Yenigun pada Oktober 2020, proyek masa depan Turki di Libya akan bernilai lebih dari \$50 miliar. Selain itu, perusahaan-perusahaan Turki yang telah menjalankan bisnisnya di Libya pada masa Khadafi mengalirkan miliaran dollar Amerika ke Turki terputus dan memiliki piutang yang belum dibayar sekitar \$1,6 miliar akibat *Arab Spring*. Dengan demikian, keterlibatan Turki atas konflik di Libya menjadi tema penting bagi politik luar negeri Turki.

Lokasi geografis Turki yang unik membuatnya kaya identitas regional. Posisi ini memberi tanggung jawab untuk memberikan stabilitas dan keamanan tidak hanya bagi negaranya tetapi juga di tingkat kawasan tersebut. Kebijakan ini ditunjukkan Turki pada konflik Libya melalui dukungannya pada GNA Fayez al Sarraj atas upaya penyerangan ibu kota Tripoli yang dilakukan LNA Khalifa Haftar. Dukungan ini sebagai upaya memastikan perdamaian dan stabilitas Libya serta mencegah perang saudara yang berlangsung semakin dalam. Terlebih lagi, dibidang militer, Turki saat ini menduduki peringkat 11 terkuat di dunia, peringkat ini naik dari posisi 14

pada tahun 2016 lalu (GFP, 2020). Dengan kemampuan militer dan ekonomi tersebut, Turki dapat terlibat aktif dalam politik kawasan dan mandiri dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

c. Konteks International

Dalam konteks internasional, situasi dalam negeri menjadi pertimbangan tindakan yang akan diambil oleh suatu negara dalam merespon isu-isu yang muncul. Konteks internasional berkaitan dengan posisi hubungan dengan negara lain dalam sistem internasional. Di dalam bukunya, William D. Coplin menyatakan adanya tiga elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara. Ketiga hal ini ialah konteks geografis, ekonomi dan politik (Coplin, 1971).

Lingkungan internasional setiap negara ialah wilayah yang didudukinya terkait dengan lokasi dan hubungannya dengan negara lain dalam sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut terjadi dalam bidang ekonomi dan politik. Bagaimanapun, geografi memainkan peran yang lebih penting, meski bukan bagian yang terpenting. Wilayah yang luas merupakan salah satu kekuatan nasional suatu bangsa, sebagai negara yang memiliki wilayah yang lebih luas menimbulkan kecenderungan untuk melakukan intervensi di negara yang lebih sempit. Misalnya intervensi Irak ke Kuwait dan Arab Saudi ke Yaman.

Pekembangan situasi di Mediterania Timur sangat mempengaruhi arah kebijakan Turki terhadap Libya. Ini berkaitan dengan wilayah Mediterania Timur yang memiliki nilai sumber daya gas alam yang besar. Negara-negara di kawasan ini, Yunani, Mesir, Yordania, Israel dan Italia membentuk Forum Gas Mediterania Timur (EstMed) guna mengangkut ekspor gas ke Eropa. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan gas pada Rusia. Negara lain mulai menyatakan minatnya untuk bergabung dalam proyek Forum *EstMed* seperti Perancis dan AS.

Ketidak harmonisan hubungan Turki dengan Mesir, Israel dan Yunani membuatnya semakin terasingkan di Mediterania Timur dan ingin merusak keberlangsungan proyek tersebut. Dalam upaya ini Turki melirik konflik Libya sebagai batu pijakan membatasi pengembangan pipa gas *EstMed*. Untuk memperoleh pengaruh yang lebih di kawasan tersebut, Turki menandatangani kesepakatan militer dan maritim dengan pemerintah GNA di Libya sehingga mampu memblokir rute pipa *EstMed* yang direncanakan. Inilah menjadi awal Turki masuk dalam konstelasi konflik Libya.

E. Hipotesa

Turki terlibat dalam konflik internal Libya karena tiga faktor sebagai berikut:

1. Atas pertimbangan kondisi politik domestik berkaitan dengan legitimasi kepemimpinan Erdogan yang semakin kuat.
2. Dalam kapasitas ekonomi dan militer sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi atas mangkraknya proyek Turki di Libya pasca *Arab Spring*.
3. Berdasarkan konteks internasional sebagai langkah menghilangkan isolasi Turki dari negara-negara yang tergabung dalam rancangan pipa gas *EastMed* (Yunani, Siprus, dan Israel)

F. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan bagi penulis untuk membatasi analisis dan menampung informasi data. Oleh karena itu, penulis akan membuat batasan dalam skripsi ini mengenai ruang lingkup waktu dari tahun 2014-sekarang perang saudara Libya sebagai dampak Arab Spring. Tahun 2019 menjadi titik keterlibatan Turki di tanah Libya. Penelitian ini dapat diperhitungkan untuk memberikan pertimbangan yang lebih baik dalam mencari faktor-faktor dibalik keterlibatan Turki dalam konflik internal di Libya.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif eksplanatif yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan ide dengan memahami sebab akibat. Pendekatan pada penelitian ini berusaha untuk memberikan analisa mengenai kausa Pemerintah Turki terlibat dalam konflik internal Libya.

Pengumpulan data menggunakan teknik *library research* dengan jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku dan media termasuk penelitian online atau internet seperti artikel, jurnal, website, berita atau laporan. Setelah mengumpulkan data dari buku atau sumber online yang relevan, data tersebut digunakan sebagai informasi untuk membantu dalam penulisan penelitian ini.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, terfokuskan pada pengamatan terhadap suatu fenomena yang ada. Permasalahan digambarkan oleh fakta-fakta yang ada. Fakta satu dihubungkan dengan fakta lainnya dan ditarik sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan sistematika penulisan, skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian, hipotesa, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Sejarah Perkembangan Peradaban dan Perpolitikan Turki dan Dinamika Hubungan Turki-Libya

Bab ini berisikan penjelasan mengenai sejarah perkembangan peradaban Turki, utamanya politik pada masa Kekhalifahan Turki Usmani hingga Turki Modern dibawah

Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dan dinamika hubungan Turki dengan Libya.

Bab III Libyan Civil War dan Keterlibatan Turki dalam Konflik Libya

Bab ini akan menjelaskan terjadinya *Libyan Civil War* dan keterlibatan Turki dalam konflik Libya.

Bab IV Analisis Keterlibatan Turki dalam Konflik Internal Libya 2019-2020

Bab ini merupakan isi dari penelitian, memuat analisa mengenai keterlibatan Turki dalam konflik internal Libya 2019-2020.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan merupakan pembahasan terakhir atau penutup dalam tulisan ini.